



ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE VALUE FOR MONEY PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERIODE 2018-2020
Paisal Jadid, Lalu Hamdani Husnan, Laila Wardani

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Mataram
paisaljadid@gmail.com

ABSTRAK

Paisal Jadid / A1B118175 / Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Value For Money Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2018-2020

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja keuangan dengan menggunakan metode *Value For Money* pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan rumusan masalah bagaimanakah analisis kinerja keuangan dengan menggunakan *Value For Money* pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Lokasi pada penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jalan Pejanggik No. 12 Kota Mataram Telp: (0370) 627689,625345 Fax:627677. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara, sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa, kinerja keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat jika dilihat dari tingkat ekonomis tahun anggaran 2018 dikategorikan cukup ekonomis karena tingkat asioekonomis berada di antara 80%-90%. Namun pada tahun 2019 sampai dengan 2020 kinerja keuangan mampu diperbaiki dengan kategori ekonomis karena tingkat rasio ekonomis berada pada 90%-100%. Dilihat dari tingkat efisiensi pada tahun 2018 dikategorikan kurang efisien karena rasio efisiensi berada pada 90%-100%. Namun pada tahun 2019 sampai dengan 2020 kinerja keuangan mampu diperbaiki dengan kategori cukup efisien karena rasio efisiensi berada pada 80%90%. Dan dari tingkat efektivitas pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami kestabilan pada kategori efektif karena rasio efektivitas berada pada 90%-100%.

Kata kunci: Kinerja Keuangan, Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas.

ABSTRACT

Paisal Jadid / A1B118175 / Financial Performance Analysis Using Value For Money Methods at the West Nusa Tenggara Provincial Financial and Asset Management Agency period 2018-2020

This study aims to assess financial performance using the Value For Money method at the Regional Financial and Asset Management Agency of West Nusa Tenggara Province. With the formulation of the problem for how to analyze financial performance using Value For Money at the Regional Financial and Asset Management Agency of West Nusa Tenggara Province.

This study uses this type of descriptive research. The location of this study was conducted at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of West Nusa Tenggara Province, Jalan Pejanggik No. 12 Mataram Telp City: (0370) 627689.625345 Fax:627677. The data used is premier data and sekunder data. Data collection techniques use documentation and interviews. The data analysis used is qualitative and quantitative analysis.

The results showed that the financial performance of the West Nusa Tenggara Provincial Financial and Asset Management Agency when viewed from the economic level of the 2018 budget year was categorized as quite economical because the economic ratio rate was between 80%-90%. But in 2019 to 2020 financial performance can be improved with the economic category because the economic ratio rate is at 90%-100%. Judging from the level of efficiency in 2018 categorized as less efficient because the efficiency ratio is at 90%-100%. But in 2019 to 2020 financial performance can be improved with a fairly efficient category because the efficiency ratio is at 80%90%. And from the level of effectiveness in 2018 to 2020 experienced stability in the effective category because the effectiveness ratio is at 90%-100%.

Keywords: Financial Performance, Economics, Efficiency, and Efficiency.



PENDAHULUAN

Sebagai organisasi terbesar di sector publik, tugas utama pemerintah adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat umum, kesejahteraan masyarakat tidak hanya mencakup kesejahteraan fisik yang berupa kesejahteraan materi, tetapi juga kesejahteraan yang tidak berwujud atau non-materi. Peningkatan kesejahteraan masyarakat hanya dapat diwujudkan jika pemerintah memiliki kinerja keuangan yang baik, karena tanpa adanya dukungan dana, maka kegiatan pembangunan dan penyediaan pelayanan umum dalam rangka merealisasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak akan dapat berjalan dengan baik. Artinya bahwa pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, apabila pemerintah daerah tersebut memiliki kinerja keuangan yang meningkat juga (Christy dan Adi, 2009). Dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari bagaimana pengelolaan aset dan keuangan yang tersusun di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Aset daerah adalah harta kekayaan Pemerintah Daerah yang terdiri dari barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang sebagian atau seluruhnya diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta dari perolehan yang sah. Pengelolaan aset daerah baik pengelolaan aset bergerak maupun tidak bergerak berhubungan dengan peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk mendukung pembangunan dan pengendalian pemerintah dari APBN yang sah.

Menurut Husnan (1997:42) Kinerja keuangan adalah hasil dari banyak keputusan keuangan individu yang dibuat secara terus menerus pada suatu lembaga atau institusi. Secara umum, kinerja keuangan adalah gambaran perusahaan yang telah berhasil menggunakan sumber daya untuk menghasilkan keuntungan financial dalam jangka waktu tertentu. Hal ini terlihat dari laporan keuangan perusahaan yang disusun untuk setiap periode.

Kinerja keuangan dibagi menjadi dua yaitu kinerja keuangan sektor publik dan sektorswasta. Kinerja keuangan sector public adalah derajat pencapaian hasil kinerja keuangan pemerintah daerah, indicator keuangannya ditentukan oleh periode anggaran atau ketentuan undang-undang kinerja keuangan yang ekonomis, efisien dan efektif secara transparan. Kinerja keuangan sector swasta adalah salah satu alat untuk pengambilan keputusan bisnis kewirausahaan. Kinerja keuangan sector swasta merupakan dasar pengambilan keputusan bisnis. Misalnya, laba dapat digunakan sebagai indicator untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Posisi keuangan perusahaan swasta yang menguntungkan dievaluasi lebih baik

daripada posisi keuangan perusahaan yang defisit. Kinerja keuangan sector swasta hanya berfokus terhadap profit perusahaan perseorangan dengan memaksimalkan kinerja keuangan perusahaan tersebut.

Dalam Manajemen Keuangan kita tidak hanya mempelajari manajemen keuangan perusahaan bisnis (Sektor Swasta) saja, namun kita juga perlu untuk mempelajari manajemen keuangan pemerintahan (Sektor Publik), karena pada Konsep Manajemen Keuangan tidak hanya tentang manajemen perusahaan saja namun terdapat juga Manajemen Keuangan Publik yang mempelajari kinerja keuangan pemerintahan dan kinerja keuangan tersebut juga tidak jauh berbeda dengan kinerja keuangan perusahaan bisnis. Hal ini membuat saya melakukan penelitian terhadap kinerja keuangan sector public untuk menyelaraskan pandangan manajemen keuangan yang dipelajari tidak hanya kinerja keuangan perusahaan namun terdapat juga kinerja keuangan pemerintahan yang perlu kita pelajari juga.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau yang lebih dikenal dengan BPKAD Provinsi NTB merupakan gabungan dari eks Bagian Perlengkapan pada Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat dan eks Biro Keuangan Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Diharapkan dengan penggabungan tersebut dapat lebih memudahkan dalam menyelesaikan permasalahan asset maupun keuangan yang sangat kompleks. Terlebih beberapa urusan di Kabupaten/Kota akan diserahkan urusannya kepada Pemerintah Provinsi dalam Pengelolaan keuangan dan aset. BPKAD Provinsi NTB juga bertugas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang keuangan dan asset daerah. Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dibawah ini :

Tabel 1. 1
Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Daerah Tahun 2018-2020

Tahun	Pendapatan		%
	Anggaran	Realisasi	
2018	5.360.502.949.869,00	4.941.246.974.628,53	92,18%
2019	5.403.971.042.675,00	5.197.727.488.242,00	92,83%
2020	5.405.179.978.133,02	5.174.293.221.665,42	97,93%

Berdasarkan pada tabel 1.1 tentang Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari tahun ketahun



terus meningkat atau dapat dikatakan stabil yaitu Pendapatan pada tahun 2018 terealisasi sebesar 92,18% dari yang telah dianggarkan dan sedikit meningkat pada tahun 2019 dengan Pendapatan sebesar 92,83% dari yang telah dianggarkan dan kemudian kenaikan melonjak tinggi pada tahun 2020 yaitu Pendapatan sebesar 97,93% dari yang telah dianggarkan. Laporan realisasi pendapatan pada tahun 2018 sampai tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 256.480.513.613,47 namun pada tahun 2020 pendapatan mengalami penurunan sebesar 23.434.266.576,58 dari realisasi pendapatan 2019.

Tabel 1. 2
Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Tahun 2018-2020

Tahun	Belanja		%
	Anggaran	Realisasi	
2018	5.197.605.398.565,83	4.668.753.881.081,77	89,83%
2019	4.710.254.015.957,49	4.375.546.682.896,76	92,89%
2020	4.894.082.197.260,65	4.559.487.835.427,00	93,16%

Berdasarkan tabel 1.2 tentang Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah dari tahun ketahun juga mengalami peningkatan dan dapat dikatakan stabil yaitu Belanja pada tahun 2018 terealisasi sebesar 89,83% dari yang telah dianggarkan, dan terjadi peningkatan pada tahun setelahnya yaitu tahun 2019 Belanja terealisasi sebesar 92,89% dari yang telah dianggarkan. Pada tahun 2020 Belanja juga ikut mengalami peningkatan sebesar 93,16% dari yang telah dianggarkan. Pada laporan realisasi belanja terdapat penurunan di tahun 2019 sebesar 293.207.198.185,01 tapi pada tahun 2020 realisasi belanja mengalami kenaikan sebesar 183.941.152.530,24.

Di sisi lain pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja ini dapat dikatakan pendapatan terus lebih besar daripada belanja setiap tahunnya yaitu Pada tahun 2018 pendapatan terealisasi sebesar 4.941.246.974.628,53 dan belanja terealisasi sebesar 4.668.753.881.081,77 sehingga disini pendapatan lebih besar dari belanja daerah. Pada tahun 2019 pendapatan terealisasi sebesar 5.197.727.488.242,00 dan belanja terealisasi sebesar 4.375.546.682.896,76 dan terjadi lagi pendapatan lebih besar dari belanja daerah. Pada tahun 2020 pendapatan terealisasi sebesar 5.174.293.221.665,42 dan belanja terealisasi 4.559.487.835.427,00 pendapatan lebih tinggi dari belanja daerah. Sehingga terjadi surplus anggaran atau pendapatan lebih besar dibandingkan dengan belanja daerah.

Pada tabel di atas juga sering terjadi perbedaan atau tidak tercapainya realisasi dengan anggaran. Hal ini dikarenakan perencanaan di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan dan menjadi salah satu penyebab

terjadinya selisih angka realisasi dengan anggaran. Revisi anggaran yang kerap dilakukan oleh satuan kerja menunjukkan bahwa rencana anggaran yang disusun belum memadai. Penetapan anggaran negara yang dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan daerah merupakan salah satu kebiasaan atau tradisi harian pemerintah di pertengahan tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak konsisten dalam menetapkan anggaran yang tetap dan akurat serta anggaran negara yang tidak tangguh dalam perkembangan ekonomi tahun berjalan.

Sebagai salah satu perangkat kelembagaan di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB melaksanakan seluruh kegiatan meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengelolaan, Pelaporan, Pertanggung jawaban, dan Pengawasan terhadap keuangan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bernilai finansial, termasuk segala bentuk harta benda yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 pada pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan untuk masyarakat. Maka dengan itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah perlu melakukan evaluasi rutin kinerja keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan metode *Value For Money* agar terciptanya kinerja yang ekonomis, efisien, dan efektif.

Berdasarkan pemaparan Latar Belakang diatas maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan berjudul "**Analisis Kinerja Keuangan dengan Menggunakan Metode Value For Money Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2018-2020**".

LANDASAN TEORI

Manajemen Keuangan Sektor Publik

Menurut Yeremias T. Keban (1995) Mengartikan manajemen public sebagai upaya untuk menunjuk pada manajemen instansi pemerintah. Manajemen Keuangan Sektor Publik mempelajari mengenai seluruh proses yang dilakukan oleh suatu organisasi public milik pemerintah maupun organisasi swasta, yang memiliki ikaitan dengan suatu bentuk penerapan atau pelaksanaan manajemen keuangan atau anggaran yang dikeluarkan oleh organisasi pemerintah maupun non-pemerintah, terutama bagaimana proses kebijakan keuangan dapat diterapkan dan dijalankan secara efektif dan efisien berbasas pada tata kelola keuangan yang baik.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas (Jumingan, 2006:239). Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja keuangan merupakan gambaran suatu perusahaan yang telah berhasil menggunakan dananya untuk mencapai keberhasilan keuangan dalam suatu periode tertentu, yang dibuktikan dari laporan keuangan perusahaan yang ditempatkan pada setiap periode.

Kinerja Keuangan dibagimen jadi dua yaitu kinerja keuangan sector publik dan sector swasta. Kinerja keuangan sector public adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kinerja keuangan pemerintah daerah, yang meliputi anggaran dan realisasi pemerintah daerah dengan menggunakan indicator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Kinerja keuangan sector public dapat berfokus terhadap kesejahteraan masyarakat dengan memaksimalkan kinerja keuangan yang ekonomis, efisien, dan efektif secara transparan. Di sector swasta, kinerja keuangan telah menjadi dasar pengambilan keputusan bisnis. Misalnya, laba dapat digunakan sebagai salah satu indicator untuk mengukur kinerja keuangan sector swasta. Kondisi keuangan perusahaan yang profit dapat dinilai lebih baik kinerja keuangannya daripada perusahaan yang merugi. Kinerja keuangan sector swasta hanya berfokus terhadap profit perusahaan perseorangan dengan memaksimalkan kinerja keuangan perusahaan tersebut.

Konsep Pengukuran Kinerja

Kinerja organisasi public perlu diukur keberhasilannya agar dapat dinilai kualitas pelayanan publik yang mereka berikan. Menurut Mahmudi (2010:12), pengukuran kinerja merupakan alat untuk menilai kesuksesan suatu organisasi. Dalam konteks organisasi sector publik, kesuksesan organisasi itu akan digunakan untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan publik. Masyarakat akan menilai kesuksesan organisasi sector public melalui kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang relative murah dan berkualitas.

Value For Money

Menurut Mahmudi (2015) *Value For Money* adalah konsep dalam organisasi sector publik yang memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang. Pengukuran kinerja value for money adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan, program, dan organisasi. Menurut Mardiasmo (2015) *Value For Money* adalah konsep Pengelolaan organisasi sector publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Dari beberapa pengertian *Value For Money* menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa *Value for money* merupakan perkiraan nilai uang. Dengan kata lain, nilai uang adalah biaya suatu produk atau jasa yang ditentukan dari kualitas penawarannya. *Value for money* merupakan peran penting dari pengukuran kinerja organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak hanya dapat dinilai dari output yang dihasilkan, tetapi input dan output harus dilihat secara bersama-sama.

1. Konsep Pengukuran Kinerja Value For Money

a. Pengukuran Ekonomis

Mardiasmo (2009:4) Ekonomis adalah perolehan sumberdaya (input) tertentu dengan harga yang rendah. Ekonomis terkait sejauh mana organisasi sector public dapat meminimalisir input resources dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Tingkat ekonomis dapat dihitung keberhasilannya dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja.

b. Pengukuran Efisiensi

Bastian (2006:77) Efisiensi adalah hubungan antara input dan output dimana barang dan jasa yang dibeli organisasi digunakan untuk mencapai output tertentu. Mardiasmo (2009:161) Efisiensi merupakan perbandingan antara output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Tingkat efisiensi dapat diukur keberhasilannya dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran pendapatan.

c. Pengukuran Efektivitas

Indra Bastian (2006:280) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan, dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tingkat efektivitas dapat diukur keberhasilannya dengan cara membandingkan realisasi anggaran pendapatan dengan target anggaran pendapatan.

Anggaran

Anggaran adalah alat akuntansi yang dapat membantu manajemen dalam merencanakan dan mengelola kegiatan perusahaan. Anggaran menunjukkan bagaimana sumber daya diharapkan diperoleh dan digunakan selama periode waktu tertentu.

Menurut Garrison, Norren and Brewer (2007:4), "Anggaran adalah rencana terperinci tentang perolehan dan

penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya selama suatu periode waktu tertentu”.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

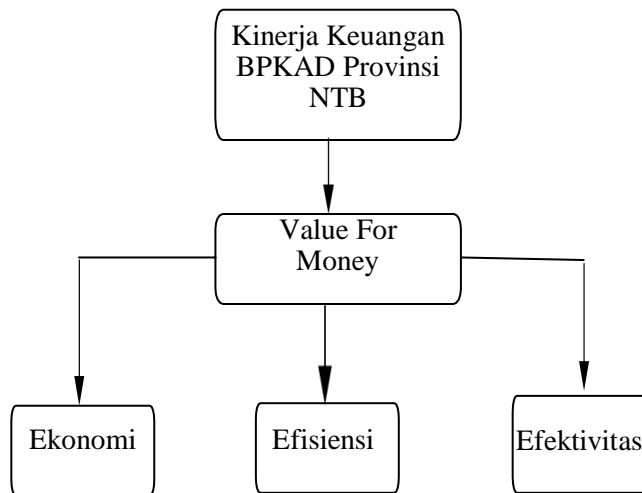
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, APBD didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu dan pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Menurut M. Yusuf (2010:1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah suatu bentuk pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada stakeholder yang didalamnya mencakup berbagai macam pekerjaan yang membutuhkan keuangan termasuk komponen aset yang tercermin dalam neraca daerah dimana setiap tahun dibuatkan laporannya setelah pelaksanaan anggaran.

Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 KerangkaKonseptual



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu dengan cara mendeskripsikan kinerja keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan metode *Value For Money* dan penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Data yang digunakan pada penelitian ini ialah Data Primer dan Data Sekunder. Dimana data primer diperoleh dari hasil wawancara setelah menghitung data yang di dapat dari instansi terkait dan beberapa referensi penelitian sebelumnya, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat periode tahun anggaran 2018-2020. APBD tersebut diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu Wawancara dan Dokumentasi. Wawancara yang dilakukan secara tatap muka dengan staf di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dokumentasi yang dilakukan yaitu dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh secara tertulis yaitu berupa dokumen, dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2018-2020.

Adapun Teknik Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis kualitatif dengan cara mendeskripsikan hasil perhitungan kinerja keuangan dengan menggunakan *Value For Money* dengan indikator ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Sedangkan, Analisis Kuantitatif digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh berupa angka-angka hasil perhitungan dari Anggaran Pendaparan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan menghitung dan menyajikan kinerja keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan menggunakan *Value For Money*.

1. Teknik Analisis

a. Ekonomis

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{REALISASI ANGGARAN BELANJA}}{\text{TARGET ANGGARAN BELANJA}} \times 100\%$$

Kriteria ekonomis yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- Jika hasil perhitungan lebih dari 100%, maka kinerja keuangan masuk dalam criteria sangat ekonomis.
- Jika hasil perhitungan antara 90% - 100%, maka kinerja keuangan masuk dalam criteria ekonomis.
- Jika hasil perhitungan antara 80% -90%, maka kinerja keuangan masuk dalam criteria cukup ekonomis
- Jika hasil perhitungan antara 60% - 80%, maka kinerja keuangan masuk dalam criteria kurang ekonomis.
- Jika hasil perhitungan dibawah 60%, maka kinerja keuangan masuk dalam kriteria sangat tidak ekonomis.



b. Efisiensi

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{REALISASI ANGGARAN BELANJA}}{\text{REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN}} \times 100\%$$

Kriteria efisiensi tersebut adalah sebagai berikut :

- Jika hasil perhitungan lebih dari 100%, maka kinerja keuangan masuk dalam kriteria tidak efisien.
- Jika hasil perhitungan antara 90%-100%, maka kinerja keuangan masuk dalam kriteria kurang efisien.
- Jika hasil perhitungan antara 80-90%, maka kinerja keuangan masuk dalam kriteria cukup efisien.
- Jika hasil perhitungan antara 60%-80%, maka kinerja keuangan masuk dalam kriteria efisien.
- Jika hasil perhitungan dibawah 60%, maka kinerja keuangan masuk dalam kriteria sangat efisien.

c. Efektivitas

Efektivitas

$$\frac{\text{REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN}}{\text{TARGET ANGGARAN PENDAPATAN}} \times 100$$

Kriteria efektivitas tersebut adalah sebagai berikut :

- Jika hasil perhitungan lebih dari 100%, maka kinerja keuangan masuk dalam kriteria sangat efektif
- Jika hasil perhitungan antara 90%-100%, maka masuk dalam kriteria efektif.
- Jika hasil perhitungan antara 80%-90%, maka kinerja keuangan masuk dalam kriteria cukup efektif.
- Jika hasil perhitungan antara 60%-80%, maka kinerja keuangan masuk dalam kriteria kurang efektif.
- Jika hasil perhitungan dibawah 60%, maka kinerja keuangan masuk dalam kriteria tidak efektif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Ditinjau dari segi Ekonomis

a. Tahun 2018

$$\text{Ekonomis} = \frac{4.668.753.881.081,77}{5.197.605.398.565,83} \times 100\%$$

$$= 89,83\%$$

Hasil perhitungan pada tahun 2018, tingkat ekonomis pada pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditulis oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah 89,83% dengan kriteria cukup ekonomis. Hal ini berarti kinerja keuangan pemerintah tahun 2018 menunjukkan kinerja yang cukup baik dikarenakan anggaran belanja yang ditargetkan sebesar Rp. 5.197.605.398.565,83 yang mana terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 4.212.581.954.681,83, Belanja Modal sebesar Rp. 976.673.053.683,00, dan Belanja tak Terduga sebesar Rp. 8.350.390.201,00 lebih kecil dari pada yang digunakan untuk merealisasikan seluruh belanja yang dianggarkan sebesar Rp. 4.668.753.881.081,77.

b. Tahun 2019

$$\text{Ekonomis} = \frac{4.375.546.682.896,76}{4.710.254.015.957,49} \times 100\%$$

$$= 92,89\%$$

Hasil perhitungan pada tahun 2019 tingkat ekonomis pada pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditulis oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah 92,89% dengan kriteria ekonomis. Hal ini berarti kinerja keuangan pemerintah pada tahun 2019 menunjukkan kinerja yang baik dikarenakan anggaran belanja yang ditargetkan sebesar Rp. 4.710.254.015.957,49 yang mana terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 3.972.495.540.317,09, belanja modal sebesar Rp. 733.758.075.185,40, dan belanja tak terduga sebesar Rp. 4.000.400.455,00, lebih kecil dari pada biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh belanja yang dianggarkan sebesar Rp. 4.375.546.482.896,76.



c. Tahun 2020

$$\text{Ekonomis} = \frac{4.559.487.835.427,00}{4.894.082.197.260,65} \times 100\% = 93,16\%$$

Hasil perhitungan pada tahun 2020 tingkat ekonomis pada pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditulis oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 93,16% dengan criteria ekonomis. Hal ini berarti kinerja keuangan pemerintah pada tahun 2020 menunjukkan kinerja yang baik dikarenakan anggaran belanja yang ditargetkan sebesar Rp. 4.894.082.197.260,65 yang mana terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 3.878.206.145.634,84., belanja modal sebesar Rp. 686.409.909.450,50 dan belanja tak terduga sebesar Rp. 329.466.142.175,3., lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh biaya yang dianggarkan sebesar Rp. 4.559.487.835.427,00.

Pengukuran Rasio Ekonomis Kinerja Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2020

Tahun	RasioEkonomis	Kriteria
2018	89,83%	Cukup Ekonomis
2019	92,89%	Ekonomis
2020	93,16%	Ekonomis
Rata-rata	91,96%	Ekonomis

Sumber : Hasil perhitungan dari tingkat ekonomis

Berdasarkan table perhitungan kinerja keuangan dari tingkat ekonomis menunjukkan bahwa penganggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada criteria ekonomis, karena dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 rasio ekonomis terus meningkat yang berkisar diantara 90%-100%. Semakin besar persentase ekonomis yang dihasilkan maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik.

Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ditinjau dari Segi Efisiensi.

a. Tahun 2018

$$\text{Efisiensi} = \frac{4.668.753.881.081,77}{4.941.246.974.628,53} \times 100\% = 94,48\%$$

Hasil perhitungan pada tahun 2018 tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah 94,48% dengan criteria kurang efisien. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan pemerintah tahun 2018 dapat dikatakan kurang baik, yaitu anggaran belanja yang terealisasi sebesar Rp. 4.668.753.881.081,77 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 3.772.427.255.676,21., belanja modal sebesar Rp. 891.887.046.339,69., dan belanja tak terduga sebesar Rp. 4.439.579.065,87., sedangkan realisasi anggaran pendapatan yang diterima sebesar Rp. 4.941.246.976.628,53 yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp. 1.660.417.707.372,53., pendapatan transfer sebesar Rp. 3.270.925.230.010,00., dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 9.904.579.065,87.

b. Tahun 2019

$$\text{Efisiensi} = \frac{4.375.546.682.896,76}{5.197.727.488.242,00} \times 100\% = 84,18\%$$

Hasil perhitungan pada tahun 2019 tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah 84,18% dengan criteria cukup efisien. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan pemerintah tahun 2019 dapat dikatakan cukup baik, yaitu realisasi anggaran belanja yang dianggarkan sebesar Rp. 4.375.546.682.896,76 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 3.702.483.611.115,43., belanja modal sebesar Rp. 669.705.153.595,0., dan belanja tak terduga sebesar Rp. 3.357.918.186,33., sedangkan realisasi anggaran pendapatan yang diterima sebesar Rp. 5.197.727.488.242,00 yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp. 1.807.482.745.855,00., pendapatan transfer sebesar Rp. 3.383.819.523.675,00., dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 6.425.218.712,00.

c. Tahun 2020

$$\text{Efisiensi} = \frac{4.559.487.835.427,00}{5.174.293.221.665,42} \times 100\% = 88,11\%$$

Hasil perhitungan pada tahun 2020 tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran dan pendapatan daerah



Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah 88,11% dengan criteria cukup efisien. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan pemerintah tahun 2020 dapat dikatakan cukup baik, yaitu anggaran belanja yang terealisasi sebesar Rp. 4.559.487.835.427,00 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 3.640.079.368.674,00., belanja modal sebesar Rp. 608.297.481.636,00., dan belanja tak terduga sebesar Rp. 311.110.985.117,00., sedangkan realisasi anggaran pendapatan yang diterima sebesar Rp. 5.174.293.221.665,42 yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp. 1.815.690.092.106,42., pendapatan transfer sebesar Rp. 3.351.385.124.044,00., dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 7.218.005.515,00.

Pengukuran Tingkat Efisiensi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2020

Sumber : Hasil perhitungan daritingkat efisiensi.

Berdasarkan table perhitungan kinerja keuangan menggunakan tingkat efisiensi menunjukkan bahwa pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan program dengan tingkat efisiensi masuk dalam criteria kurang efisien dan cukup efisien karena pada tahun 2018 tingkat efisiensi berada diantara 90-100% yang menunjukkan tingkat efisiensi berada pada kurang efisien sedangkan pada tahun 2019-2020 rasio efisiensi berada diantara 80-90% yang menunjukkan tingkat efisiensi berada pada cukup efisien. Namun dari ketiga tahun tersebut dihitung rata-rata dan tingkat efisiensi menunjukkan pada criteria Cukup Efisien.

Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ditinjau dari Segi Efektivitas.

a. Tahun 2018

$$\text{Efektivitas} = \frac{4.941.246.974.628,53}{5.360.502.949.869,00} \times 100\%$$

$$= 92,17\%$$

Hasil perhitungan pada tahun 2018 tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah 92,17% dengan criteria efektif. Hal ini berarti kinerja keuangan

pemerintah tahun 2018 menunjukkan kinerja yang baik, yaitu realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp. 4.941.246.974.628,53 yang terdiri dari pendapat anasli daerah sebesar Rp. 1.660.417.707.372,53., pendapatan transfer sebesar Rp. 3.270.925.230.010,00., dan lain lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 9.904.037.246,00., hamper mendekati target anggaran pendapatan yang di targetkan sebesar Rp. 5.360.502.949.869,00 yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp. 1.767.746.421.040,00., pendapatan transfer sebesar Rp. 3.387.820.694.184,00., dan lain- lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 204.935.834.645,00.

b. Tahun 2019

$$\text{Efektivitas} = \frac{5.197.727.488.242,00}{5.403.971.042.675,00} \times 100\%$$

$$= 96,18\%$$

Hasil perhitungan pada tahun 2019 tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah 96,18% dengan criteria efektif. Hal ini berarti kinerja keuangan pemerintah pada tahun 2019 menunjukkan kinerja yang baik, yaitu realisasi anggaran pendapatan pada tahun 2019 sebesar Rp. 5.197.727.488.242,00 yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp.

Tahun	RasioEfisiensi	Kriteria
2018	94,48%	Kurang Efisien
2019	84,18%	CukupEfisien
2020	88,11%	CukupEfisien
Rata-rata	88,92%	CukupEfisien

1.807.482.745.855,00., pendapatan transfer sebesar Rp. 3.383.819.523.675,00, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 6.425.218.712,00 hampir mendekati target anggaran pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp. 5.403.971.042.675,00 yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp.1.708.660.958.875,00., pendapatan transfer sebesar Rp. 3.645.310.083.800,00, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 50.000.000.000,00.

c. Tahun 2020

$$\text{Efektivitas} = \frac{5.174.293.221.665,42}{5.405.179.978.133,02} \times 100\%$$

$$= 95,72\%$$



Hasil perhitungan pada tahun 2020 rasio efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah 95,72% dengan criteria efektif. Hal ini berarti kinerja keuangan pemerintah pada tahun 2020 menunjukkan kinerja yang baik, yaitu realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp. 5.174.293.221.665,42 yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp. 1.815.690.092.106,42., pendapatan transfer sebesar Rp. 3.351.385.124.044,00., dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 7.218.005.515,00., hampir mendekati target anggaran pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp. 5.405.179.978.133,02 yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp. 1.979.279.325.434,02., pendapatan transfer sebesar Rp. 3.422.354.916.440,00., dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 3.545.736.250,00

Pengukuran Tingkat Efektivitas Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2018-2020

Berdasarkan table hasil perhitungan kinerja keuangan dengan tingkat efektivitas menunjukkan bahwa penganggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2018 sampaidengan 2020 berada pada criteria

Tahun	RasioEfektivitas	Kriteria
2018	92,17%	Efektif
2019	96,18%	Efektif
2020	95,72%	Eferktif
Rata-rata	94,69%	Efektif

Efektif karena kategori tingkat efektivitas berada pada 90%-100% karena realisasi anggaran mampu mendekati target anggaran yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program-program yang direncanakan telah tercapai.

Pengukuran Tingkat Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2020

Tahun	2018	2019	2020	Rata-rata
Tingkat Ekonomis	89,83%	92,89%	93,16%	91,96%
Kriteria	Cukup Ekonomis	Ekonomis	Ekonomis	Ekonomis
Tingkat Efisiensi	94,48%	84,18%	88,11%	88,92%
Kriteria	Kurang Efisien	Cukup Efisien	Cukup Efisien	Cukup Efisien
Tingkat Efektivitas	92,17%	96,18%	95,72%	94,69%
Kriteria	Efektif	Efektif	Efektif	Efektif

Sumber : Hasil perhitungan dari tingkat ekonomis, efisiensi, efektivitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi program yang diukur dari tingkat ekonomis pada tahun 2018 dikategorikan cukup ekonomis dan pada tahun 2019 sampai dengan 2020 berada pada criteria ekonomis namun rata-rata menunjukkan bahwa tingkat ekonomis berada pada tingkat ekonomis. Kriteria ekonomis menunjukkan kinerja yang baik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ekonomis terkait yaitu instansi berhasil melakukan penghematan anggaran untuk memperoleh input dan tidak melakukan pemborosan anggaran dalam pelaksanaan program, kegiatan dan operasional organisasi.

Hasil pengukuran kinerja keuangan dari tahun 2018 sampai dengan 2020 dengan rata-rata dari ketiga tahun tersebut tingkat efisiensi berada pada criteria cukup efisien. Efisiensi merupakan perbandingan antara input dan output. Kinerja keuangan yang dilakukan belum dapat dikatakan efisien karena kinerja keuangan yang dilakukan berada pada criteria cukup efisien. Berarti kinerja keuangan yang telah terlaksana belum cukup untuk memaksimalkan output tertentu dengan input yang serendah-rendahnya. Langkah yang perlu dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memperbaiki tingkat efisiensi yaitu melakukan evaluasi terhadap perencanaan dan pengelolaan APBD tahun berikutnya dengan memperhatikan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) khususnya dalam merencanakan pendapatan dan belanja daerah, dari sisi pendapatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang lebih



realistis dan terukur serta lebih inovatif dalam mengelola potensi pendapatan daerah, sedangkan dari sisi belanja Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi NTB harus lebih memperhatikan belanja yang rasional dan terukur dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi sehingga standar harga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah menjadi rasional dan dapat direalisasikan, disamping itu SKPD dalam menyajikan rekening belanja harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai Permendagri 13 tahun 2006 sehingga tidak terjadi kesalahan akun yang menyebabkan anggaran belanja tidak dapat direalisasikan. Hal ini sangat perlu untuk segera diambil langkah untuk dapat menyelesaikan efisiensi yang masih belum cukup tercapai guna dapat mensejahterakan masyarakat.

Pengukuran kinerja tahun 2018 sampai dengan 2020 yang diukur berdasarkan tingkat efektivitas dengan rata-rata yang dapat dikategorikan efektif. Hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan tingkat efektivitas anggaran berkisar diantara 90% sampai dengan 100%. Hasil tersebut menunjukkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan sudah berjalan baik. Hal ini tercermin dari pelaksanaan program yang telah direncanakan oleh pemerintah. Antara lain, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang melalui pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, keagamaan, seni budaya, olahraga dan pemuda. Perencanaan dan peningkatan kualitas lingkungan perkotaan, desain penataan kawasan tepian sungai, pembangunan sarana dan prasarana transportasi dan manajemen lalu lintas, peningkatan dan pengembangan pelayanan air minum, pengembangan sector industri, perdagangan dan jasa, koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta pariwisata.

Pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan metode *Value For Money* berdasarkan pada tiga elemen penting ialah ekonomis, efisiensi, dan efektivitas yang telah terlaksana pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang telah diukur dari tingkat efisiensi dengan rata-rata tiga tahun yang diukur berada pada kriteria cukup efisien. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang dilakukan belum sempurna untuk menghasilkan input dengan output yang serendah-rendahnya. Namun dengan cukup efisiennya kinerja keuangan yang dilakukan dapat ditutupi oleh tingkat ekonomis dan efektivitas karena pada tingkat ekonomis kinerja keuangan yang diukur menunjukkan kriteria yang ekonomis yang berarti kinerja keuangan berhasil melakukan penghematan anggaran untuk memperoleh input dan tidak melakukan realisasi anggaran yang sia-sia dalam melaksanakan program, kegiatan, dan operasional organisasi. Adapun pada tingkat efektivitas

telah memenuhi kriteria efektif karena realisasi anggaran mampu mendekati target anggaran yang telah dianggarkan yang berarti program-program yang dilaksanakan telah berjalan dengan baik dan mencapai target yang diharapkan.

KESIMPULAN

Tingkat ekonomis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berada pada kriteria ekonomis karena hasil perhitungan dari tingkat ekonomis yaitu antara 90%-100% meskipun pada tahun 2018 rasio di antara 80%-90% yang dikategorikan cukup ekonomis namun pelaksanaan yang dilakukan oleh BPKAD NTB untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTB pada tahun setelahnya dapat diperbaiki dari tahun ketahun dengan menghitung rata-rata dari tiga tahun tersebut tingkat ekonomis berhasil mencapai kriteria ekonomis. Hal ini menunjukkan yaitu pada pelaksanaan anggaran pemerintah telah mampu melakukan penghematan dalam merealisasikan anggaran dalam melaksanakan program-program atau kegiatan yang hendak dicapai.

Tingkat efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dikategorikan cukup efisien karena berada pada rasio di antara 80%-90%, meskipun pada tahun 2018 rasio berada pada 90%-100% yang dikategorikan kurang efisien namun pelaksanaan yang dilakukan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTB pada tahun setelahnya dapat diperbaiki dari tahun ketahun dan dihitung dengan rata-rata tiga tahun tingkat efisiensi dapat dikategorikan menjadi cukup efisien. Hal ini menunjukkan yaitu dalam pelaksanaan anggaran belanja sudah cukup baik untuk memenuhi syarat efisiensi dengan melakukan penghematan dana untuk mencapai hasil maksimal. Namun hal ini dapat perlu diambil langkah agar dapat mencapai tingkat efisiensi yang lebih baik guna mensejahterakan masyarakat.

Tingkat efektivitas kinerja keuangan pada tahun 2018 sampai dengan 2020 dikategorikan efektif karena hasil rasio efektivitas berada pada di antara 90%-100%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan telah sempurna dan sesuai dengan yang diinginkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Amstrong, M dan Baron F. 2016. Manajemen Kinerja Cetakan Ketujuh, Jakarta: Erlangga.
- As'ad. 1991. Seri Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia Psikologi Industri. Bandung : Alumni
- Bastian, Indra 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga
- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga :Jakarta
- Christy, Andrea, F.,Adi, P.H. 2009. "Hubungan Antara Dana AlokasiUmum, Belanja Modal Dan Kualitas Pembangunan Manusia". The 3Rd National Conference UKWMS Surabaya, october 10th 2009.
- Darsono Dan Tjatjuk, Siswandoko, 2011, Manajemen Sumber Daya Manusia Abad 21, Nusantara Consulting, Jakarta
- De Brujin, H. 2002. "Performance measurement in the public sector: strategies to cope with the risks of performance measurement", International Journal of Public Sector Management, Vol 15 Nos 6/7, pp. 578-594.
- Donovan, F. & A.C. Jackson. (1991). Managing Human Service Organizations. NewYork,
- Garrison, Noreen, dan Brewer. (2007). Akuntansi Manajerial.Edisi 11. Diterjemahkan oleh : Nuri Hinduan dan Edward Tanujaya. Salemba Empat. Jakarta.
- Husein, Umar. 2011. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Jumingan. 2006. AnalisisLaporan Keuangan, Cetakan Pertama, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Keban, Jeremias T",1995,"Indikator Kinerja Pemerintah Daerah",Yogyakarta:UGM.
- Kirom, Bahrul (2015). *Mengukur Kinerja Pelayanan Kepuasan Konsumen* (4). Bandung: Pustaka RekaCipta.
- Mahmudi (2015), Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua.Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik.Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Jakarta. STIE YKPN.
- Mahmudi. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Ketiga, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun. 2013. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta.BPFE
- Mardiasmo, 2002.Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi Yogyakarta
- Mardiasmo. 2009. AkuntansiSektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo.(2011). Perpajakan. EdisiRevisiTahun 2001. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo.(2015). PerpajakanEdisiRevisi. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Munawir, S.2000. Analisa Laporan Keuangan. Yogyakarta: Liberty.
- Musthafa. 2017. Manajemen Keuangan. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Nafarin, M. 2007. Penganggaran Perusahaan. Edisi Ketiga. Jakarta:Salemba
- Nor, Ghofur.2005,Manajemen Publik Pada Pemerintahan. CetakPertama,Jakarta : Bumi Angkasa
- Nordiawan, Deddi (2010), Akuntansi Sektor Publik, (Jakarta :Salemba Empat, 2010)
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. Akuntansi Sektor Publik.Edisi Kedua. Jakarta:Salemba Empat
- Rudianto (2009).Pengantar akuntansi. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sartono, Agus. 2011. Manajemen KeuanganTeori dan Aplikasi. Yogyakarta: BPFE.
- Sugiyono.(2009). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung :Alfabeta.
- Tanjung, Abdul H. (2006), Akuntansi Keuangan Daerah Konsep dan Aplikasi. Bandung: Alfabeta



Yusuf, M. 2010. Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju
Pengelolaan Keuangan Daerah
Terbaik. Jakarta: Salemba Empat.

<http://bpkad.ntbprov.go.id/>